



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2016 – 2017
Masa Sidang : IV
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Rabu, 4 April 2017
Sifat : Terbuka
Pukul : 19.30 WIB s.d 21.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : Membahas mengenai pembubaran BPLS
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran
terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 19.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah membahas mengenai pembubaran Bapel Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami keputusan Pemerintah atas pembubaran Lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang kemudian tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar penanganan lumpur sidoarjo tetap menjadi prioritas.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pelaksanaan kewajiban pembayaran ganti kerugian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak termasuk para pelaku usaha di dalam peta area terdampak, melakukan upaya mitigasi serta mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
3. Komisi V DPR RI RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar pengalihan aset dan pembiayaan kegiatan BPLS Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan dengan tetap menjalankan program yang sudah ada, serta proses pengalihan aset dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar proses pengalihan anggaran dari BA 105 ke BA 033 sejumlah Rp 458.498.922.000,- dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.30 WIB.

Jakarta, 5 April 2017

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,



FARY DJEMY FRANCIS